

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BUMN memiliki perusahaan salah satunya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jalan tol di Provinsi Sumatera Utara, perusahaan tersebut wajib menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan merupakan suatu program bantuan yang di berikan oleh BUMN dengan cara memberikan dana pinjaman bergulir untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan memiliki tujuan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan yang sasarannya ditujukan kepada Mitra Binaan (UKM).

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan mengeluarkan dana pinjaman ini menggunakan mekanisme sebagai berikut (a) calon mitra binaan (UKM) yang membutuhkan dana pinjaman pemohon kredit mengajukan berkas. (b) kemudian dilakukan penyidikan berkas apakah berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. (c) kemudian tahap wawancara I. (d) setelah di wawancarai, kemudian tahap on the spot yaitu kegiatan pemeriksaan kelengkapan. (e) kemudian wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot

dilapangan. (f) setelah selesai di wawancara kemudian tahap keputusan kredit apakah kredit akan diberikan atau ditolak. (g) jika diterima kemudian tahap penandatanganan akad kredit. (h) setelah ditandatangani lalu realisasi kredit diberikan. (i) kemudian dana dapat disalurkan ke mitra binaan.

Setelah pihak Mitra Binaan (UKM) Mendapatkan dana pinjaman yang di berikan oleh PKBL PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan, pihak UKM wajib mengembalikan pinjaman secara tepat waktu sesuai pinjaman yang telah disepakati dan Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada PKBL PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan. Dan keuntungan yang di dapatkan oleh pihak PKBL untuk perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan sebesar 3 % dari laba setelah pajak tahunan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No PER-02/MBU/07/2017.

Program kemitraan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan dalam hal ini penyaluran dana bergulir di dasari oleh UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN RI No PER- 02/MBU/07/2017 yang dimana di dalamnya menjelaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, serta wujudnya adalah dilaksanakannya PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) oleh seluruh

BUMN.

Program bina lingkungan yaitu program yang memberdayakan kondisi masyarakat yang berada di sekitaran perusahaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek melalui pemanfaatan dana perusahaan setelah pajak maksimal sebesar 3%, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No PER-02/MBU/07/2017, yang di dalamnya memiliki kreteria sebagai berikut: (a), Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (b), Milik Warga Negara Indonesia. (c), Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. (d), Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi. (e), Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. (f), Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun. (g), Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Hal-hal tersebut adalah kriteria yang dituangkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN. Namun pada praktiknya, di BUMN PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan, setiap calon mitra binaan juga harus memiliki jaminan baik berupa BPKB, Surat Tanah, Akte jual Beli atau surat berharga lainnya yang dititipkan kepada perusahaan untuk menjaga etikad baik atas pinjaman yang dilakukan.

Program kemitraan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan dilaksanakan mulai tahun 1994 sampai saat ini. Dana bergulir yang telah disalurkan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan pada Tahun 2022 yaitu Rp. 465.300.000 kepada 15 Mitra Binaan yang berasal dari beberapa kabupaten dan kota yaitu 6 mitra binaan dari kabupaten Binjai, 4 mitra binaan dari kabupaten Deli Serdang, dan 5 mitra binaan dari kota Medan. Pinjaman lunak ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjalankan usaha mikro dalam berbagai sektor sehingga usahanya akan memberikan kontribusi secara positif, dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, serta dapat menjadi pengusaha yang mampu bersaing dengan para UKM baik provinsi maupun daerah.

Sasaran dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) adalah Mitra Binaan Atau Yang Di Sebut Usaha Kecil Menengah (UKM) dan memiliki tujuan pencapaian pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi dalam mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa kendala yaitu masih sangat minim sekali pengetahuan dan informasi dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan terhadap masyarakat dan masih banyaknya UKM yang menunggak pembayaran sehingga dapat menghambat pembayaran UKM lain yang menyebabkan tujuan dan sasaran tidak tercapai.

Pada dasarnya, peran BUMN termasuk PKBL PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan dalam pemberdayaan UKM tidak hanya terdiri dari pemberian bantuan saja, namun juga pembinaan. Pembinaan yang mencakup pemberian pemahaman dan juga pemberian keterampilan kepada UKM dalam

mengelola dana usahanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No PER-02/MBU/07/2017 yang telah disebutkan di atas. Namun unit CDC (Community development center) sebagai unit pelaksanaan program kemitraan terlihat cenderung lebih mengutamakan pemberian bantuan saja sedangkan dalam hal pembinaan belum dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : **Bagaimana Efektivitas pelaksanaan penyaluran dana pinjaman bergulir pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan ?**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyaluran dana pinjaman bergulir pada program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran dana pinjaman bergulir pada program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat secara umum mengenai efektivitas pelaksanaan penyaluran dana pinjaman bergulir pada program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan yang diberikan kepada usaha kecil menengah di wilayah kota Medan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran dana pinjaman bergulir pada program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi masyarakat akan dana pinjaman bergulir Program Kemitraan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Konsep Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

(Sitta Inka Putri Mamonto et al., 2022) Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan. Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Menurut Mahmudi (2019:86) efektivitas adalah hubungan antara output terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas menurut Rosalina (2012: 3) adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

2.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun menurut Sutrisno (2011 dalam (lubis, 2018) terdapat empat kelompok variable yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu:

- a) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi.
- b) karakteristik lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
- c) karakteristik karyawan.
- d) kebijakan praktik manajemen.

Handayani (2017:17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat.

Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya; kebijakan dan pilihan tujuan yang mumpuni, kemampuan sumber daya manusia yang mengelola, dukungan lingkungan internal dan eksternal organisasi, pembiayaan atau anggaran yang mencukupi, serta ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas yang diharapkan tercapainya keberhasilan suatu pekerjaan atau program di dalam organisasi.

2.1.3. Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterfresentasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Handayani (2017: 13) menjelaskan kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada.

2.1.4. Efektivitas Program

Efektivitas program juga merupakan suatu ukuran keberhasilan dari program yang sedang dijalankan. Secara umum efektivitas program memiliki arti telah berhasilnya suatu program yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Definisi efektivitas sendiri telah dikemukakan sebelumnya melalui beberapa pendapat para ahli diantaranya yaitu, menurut Raihani (2015: 8) adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Nainggolan (2016: dalam (Sudirman & Muazansyah, 2022) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Kemudian Andari (2017: 16) mendefinisikan efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Menurut Siagian (2015: 189) Efektivitas program dapat diketahui pelatihan dan pengembangan harus jelas diketahui apa yang ingin dicapai. salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengajarkan keterampilan tertentu yang pada umumnya berupa keterampilan baru yang belum dimiliki oleh para pekerja padahal diperlukan dalam pelaksanaan tugas dengan baik.

Menurut Budiani (2007: 53) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- a) ketepatan sasaran program (yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya).
- b) sosialisasi program (yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya).
- c) tujuan program (yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya).
- d) pemantauan program (yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program).

Nasution (2017: 19) menjelaskan bahwa efektivitas program memiliki beberapa ukuran efektivitas, antara lain;

a) pencapaian tujuan (pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

- 1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan,
 - 2) sasaran merupakan target yang kongkrit);
- b) Sumberdaya yang terampil
- c). Kerjasama yang baik
- d). Sarana dan prasarana
- e). Pelayanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Efektivitas program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan pencapaian tujuan, sumberdaya yang terampil, kerjasama yang baik, sarana dan prasarana, serta pelayanan.

Maka Efektivitas program dapat dikatakan efektif jika diukur dari ; pencapaian tujuan, sumberdaya yang terampil, kerjasama yang baik, sarana dan prasarana, serta pelayanan.

2.2. Konsep Pelaksanaan

2.2.1. Pengertian Pelaksanaan

Siagian (2007 dalam (FU Nabila, 2022) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan (actuating) dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang ada.

Paslong (2008:2) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan.

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin (2002:70) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Nawawi (2003: 95) menjelaskan bahwa actuating terdiri dari beberapa kegiatan yakni pengarahan (commanding), bimbingan (directing) dan komunikasi (communication). Secara langsung dijelaskan bahwa pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.

Menurut Agustino (2006 : 149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan (actuating) merupakan suatu tugas seorang pimpinan untuk menggerakkan anggotanya dan mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan atau mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi.

2.2.2. Fungsi Dan Tujuan Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakkan seluruh potensi utama sumber daya manusia (sdm) yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi. Setiap sdm harus bekerja sesuai dengan tujan, fungsi, dan peran. Keahlian dan kompetensi masing-masing sdm untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Tujuan pelaksanaan (Pandipa, 2023) yaitu :

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efesien.
- b) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf.
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.

- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

2.2.3. Perinsip Pelaksanaan

Menurut Kurniawan (2009 dalam (Martin, 2022), prinsip-prinsip dalam pelaksanaan (actuating) antara lain:

- a) memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- b) mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia.
- c) menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi.
- d) menghargai hasil yang baik dan sempurna.
- e) mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
- f) memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
- g) memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ada beberapa elemen dalam pelaksanaan (Mulyadi et al., 2022) yaitu sebagai berikut:

- a) coordinating adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

b) motivating merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan, dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup maka kinerja para karyawan dalam perusahaan akan optimal.

c) communication adalah komunikasi antara para pemimpin dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

d) commanding merupakan suatu perintah dari atasan kepada bawahannya. Dengan pengarahan yang baik dari atasan dengan visi dan misi yang jelas dari suatu manajer perusahaan dapat menimbulkan efek yang positif untuk perusahaan itu sendiri.

2.2.4. Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No PER-02/MBU/07/2017 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara menyatakan bahwa usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Milik warga Negara Indonesia

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non bank.

2.3. Penyaluran Dana Pinjaman (Kredit)

2.3.1. Penyaluran Dana Pinjaman

Penyaluran dana pinjaman merupakan bagian dari program kerja Unit PKBL untuk mensukseskan usaha di lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan dalam bentuk kredit bunga rendah yang digunakan sebagai modal kerja atau modal usaha. Beberapa konsentrasi usaha mitra binaan antara lain : warung nasi, ponsel, toko obat, Jualan Pakaian, rumah makan serta masih banyak bidang usaha lain, memperoleh penyaluran dana untuk selanjutnya dimonitor oleh Unit Kerja PKBL terkait penggunaan dana tersebut.

2.3.2. Pengertian kredit

Menurut Kasmir (2014 dalam (Priyambodo, 2019) dalam bahasa latin kredit di sebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau atigah yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah suatu kepercayaan yang dimana si peminjam dapat mengembalikan pinjaman ke pada bank dengan tepat waktu yang sudah di tentukan oleh pihak bank tersebut.

2.3.3. Tujuan Kredit

Tujuan Kredit Menurut kasmir (2014 dalam (R rachmayanti, 2019) adalah Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri, adapun tujuan pemberian kredit sebagai berikut :

- a) Mencari keuntungan untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah
- b) Membantu usaha nasabah unuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal

kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c) Membantu pemerintah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik.

2.3.4. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank jika dilihat dari segi (Ardiyanto, 2013) adalah sebagai berikut:

a. Dari segi penggunaannya

1. Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dan masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dari biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dari segi tujuan kredit:

1. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi.
2. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c) Dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah memiliki jangka kreditnya berkisar satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
- 3) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

d) Dilihat dari segi jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan sicalon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e) Dilihat dari sektor usaha

1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil industri menengah atau industri besar.

4) Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. jenis usaha tambang yang biasanya dibiayai dalam jangka panjang.

5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan unruk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapatpula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dokter, dosen dan pengacara.

- 7) Kredit perumahan merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

2.4.1 Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Kemitraan dan Bina Lingkungan menurut fitria (2015:267) merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.

Kemitraan dan Bina Lingkungan Menurut Handayani (2017:41) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pihak yang menjadi penerima bantuan program kemitraan disebut Mitra Binaan, yaitu pihak yang memiliki usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Program Kemitraan selain dilaksanakan melalui penyaluran dana bergulir juga pemberian pelayanan dukungan non material kepada para mitra binaannya diantaranya yaitu: Pembentukan mitra binaan, Pemberian dukungan pelatihan dan keterampilan. Pemberian kesempatan untuk melakukan promosi pada event-event nasional maupun internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No PER-02/MBU/07/2017 adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bantuan Program Bina Lingkungan

diantaranya: Bantuan korban bencana alam, Bantuan pendidikan dan pelatihan. Bantuan peningkatan kesehatan, Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, Bantuan sarana ibadah, Bantuan pelestarian alam. Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai. Program kemitraan merupakan salah satu program yang diadakan oleh setiap BUMN. Program ini merupakan program penyaluran dana bergulir, yang menjadi bantuan tambahan modal usaha bagi UKM dengan syarat, prosedur dan waktu pengembalian yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No PER-02/MBU/07/2017 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara menyatakan bahwa usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2. Milik warga Negara Indonesia
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non bank.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan program kemitraan dan Bina Lingkungan adalah suatu bentuk program bantuan dan kerjasama dalam bentuk usaha diberbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil (UKM) agar menjadi tangguh dan mandiri dan mampu bersaing antar UKM lainnya serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi bagi UKM yang bersangkutan.

Usaha mikro menurut Asmawita (2017:127) adalah usaha untuk menghasilkan dan menguntungkan yang dijalankan dan dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha mikro sering dikaitkan dengan usaha yang dilakukan dengan memakai alat alat yang sederhana, metode yang sederhana, sumber daya yang terbatas dan modal terbatas, seperti industri rumah tangga, para pengrajin, usaha keda, kios dan warung.

Usaha kecil menengah Menurut Agustina (2015 dalam (Fatma, 2019) didasarkan pada besarnya hasil pendapatan usaha, besarnya modal, jumlah tenaga kerja hingga bentuk usahanya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan UKM adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu keuntungan bersama dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan UKM yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan komarudin (1997 dalam mengatakan pelayanan merupakan suatu prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain.

Berdasarkan Syafii (1998 : 39) mengatakan pelayanan adalah suatu hal yang dapat menolong, menyambut, membahas, memindahkan, memuaskan, menghidangkan menyuguhkan, membantu menanggapi , menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau menanggapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain.

Berdasarkan Lewis dan gilman (2005 dalam mengatakan pelayanan adalah kepercayaan public warga Negara berharap pelayanan public dapat melayani dengan kejujuran dan sumber daya penghasil secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan menghasilkan kepercayaan public. Dibutuhkan etika pelayanan public sebagai pilar dan kepercayaan public dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan adalah suatu tindakan yang dapat memuaskan

masyarakat dalam suatu tindakan atau pertolongan dan menyuguhkan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan pelayanan yang puas baik untuk yang dilayani maupun yang melayani.

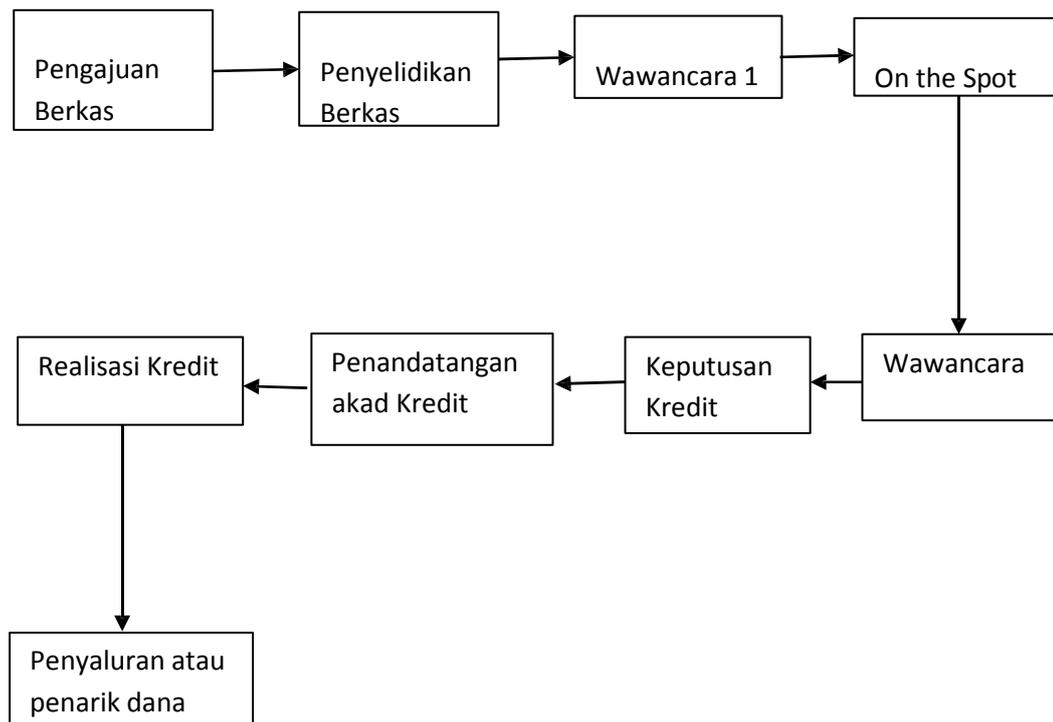
2.4.2. Ruang Lingkup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Adapun ruang lingkup penyaluran dana program kemitraan dan Bina Lingkungan (Sunaryo, 2021) adalah sebagai berikut:

- a) Bantuan untuk korban bencana alam
- b) Bantuan untuk pendidikan/pelatihan
- c) Bantuan untuk peningkatan kesehatan
- d) Bantuan perbaikan/pengembangan sarana/prasarana ibadah dan umum
- e) Bantuan pelestarian alam

2.4.3. Mekanisme Penyaluran Pinjaman Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Mekanisme Penyaluran Pinjaman Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. JASA Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera



Sumber Data : PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan

1. Pengajuan Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposional. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang di butuhkan. Pengajuan proporsional kredit hendaknya yang berisi:

- a. Latar Belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berupa

pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Maksud dan Tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin di peroleh dan jangka waktu kreditnya.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risik terhadap kemungkinan mecatnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Selanjutnya proposal ini di lampiri dengan berkas-berkas yang telah di persyaratkan seperti akte notaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Neraca, dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, bukti diri dari pimpinan perusahaan, fotocopy sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, kama nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidik kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

4. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau dengan berbagai objek yang akan di jadikan usaha atau jaminan, kemudian kemudian hasil on the spot di cocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan di berikan atau di tolak, jika diterima, maka di persiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang di terima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus di bayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum kredit di cairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit di berikan setelah penandatanganan surat-surat yang di perlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

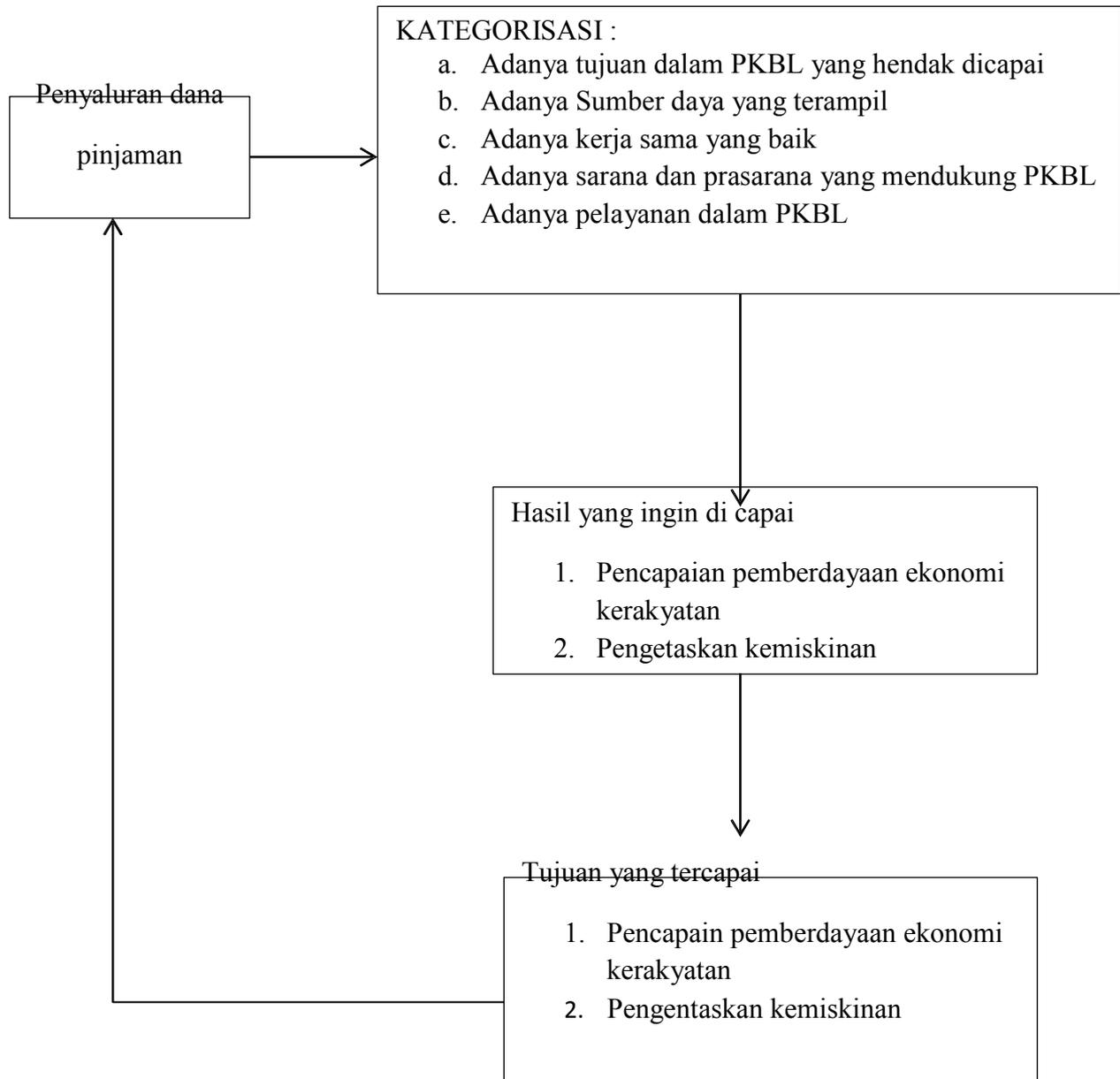
9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuannya dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.4.4. kewajiban mitra binaan

Mitra Binaan mempunyai kewajiban : Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan, Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai pinjaman yang telah disepakati, Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada PKBL PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan. Dana pinjaman Program Kemitraan yang diterima Mitra Binaan dikenakan jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman.

2.5. Kerangka Alur



2.6. Defenisi Konsep

Adapun Definisi konsep dalam penelitian ini antara lain:

- a) efektivitas merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dan memiliki nilai nilai yang telah disepakati bersama antara para stekholder dengan organisasi yang bersangkutan.
- b) pelaksanaan (*actuating*) merupakan suatu tugas seorang pimpinan untuk menggerakkan anggotanya dan mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan atau mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi.
- c) Penyaluran Dana Pinjaman (*kredit*) adalah suatu kepercayaan yang dimana si peminjam dapat mengembalikan pinjaman ke pada bank dengan tepat waktu yang sudah di tentukan oleh pihak bank tersebut.
- d) program kemitraan dan Bina Lingkungan adalah suatu bentuk program bantuan dan kerjasama dalam bentuk usaha diberbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil (UKM) agar menjadi tangguh dan mandiri dan mampu bersaing antar UKM lainnya.

2.7. Kategorisasi

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan dalam PKBL yang hendak dicapai.
- b. Adanya sumber daya yang terampil.
- c. Adanya kerja sama yang baik.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung PKBL
- e. Adanya pelayanan dalam PKBL.

2.8. Narasumber

1. Narasumber 1

Nama : Arief Basuki

Usia : 41 tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan/ Jabatan : Business Support Department Head

2. Narasumber 2

Nama : Jannes Simorangkir

Usia : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan/ Jabatan : Business Support Specialist

3. Narasumber 3

Nama : Pristi Noventri

Usia : 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/ Jabatan : Senior Officer Business Support

4. Narasumber 4

Nama : Anisah

Usia : 55 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/ Jabatan : UKM

5. Narasumber 5

Nama : Inayah Wulandara

Usia : 27

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/ Jabatan : UKM

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Lama Penelitian

Objek penelitian merupakan sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yang dipilih adalah PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan, dengan alamat Jalan Aluminium Raya, Tanjung Mulia, Kecamatan Deli, Kota Medan. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan desember 2022 hingga selesainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.2. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait topik penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian **Simanjuntak** (Mukrimaa et al., 2016) **data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.**

Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder berupa informasi mengenai sejarah perusahaan, serta struktur organisasi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, biasanya suatu metode penelitian atau lebih dipilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau interview dengan informasi atau pihak yang terkait untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana kas kecil pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan.
- b. Observasi yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli kemudian mengolah kembali dokumen tersebut, sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar.

3.4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara teknik deskriptif kualitatif, menurut sugiono (2014; 33) artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada di analisis serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.